

AGAMA, PERSAUDARAAN, DAN IKATAN EMOSIONAL: HARMONI SOSIAL MINORITAS MUSLIM PAPUA BARAT*

Ismail Suardi Wekke**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong
Research Fellow Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
Email: iswekke@gmail.com

ABSTRACT

Religion is a way to start a war. It seems that through religion, a group of people would kill other groups because of different choices of belief. On the other hand, Papua and West Papua reflect change patterns. Religion is a pillar for agreement and religiosity. This paper expands the recent condition of West Papua society. They choose different religions in one big family. However, these differences do not make a chance to divide but opportunities to heighten their solidarity and unity. There are a lot of moments to redirect the statement. Musabaqah Tilawatil Quran and Paduan Suara Gereja (PESPARAWI) are two of them. Both events are a chance to work together. They tried to hold the festival even though this is a benefit for one group of people. In addition, they make it as a pride of provincial people. It is not for Muslim or Christian only, but also for the people of West Papua. Another sample is higher education. The university is organized under certain religious organization. Those universities did not close to students from different religious choices. They participate in the class and chair many positions related to educational situations. On the religious celebration, the city celebrates it together and tried to cheer up others by extending the meal package or parcel as a gift for the neighbor. Last practice is place of prayer. Mosque and Church formed with support from other religions' believers. Finally, this article concludes that religion in West Papua does not seem as the source of problem. Moreover, it is the pillar of society to extend the kinship and emotional relationship. The social institution is bigger than a matter of religion. Brotherhood is the key of relation in the society to conserve the peace and harmony.

Keywords: Religion, Solidarity, Society

PENDAHULUAN

Begitu referensi tentang Papua, secara terbatas dalam makalah ini merujuk kepada Papua Barat saja, maka selalu saja hanya berkaitan dengan kekerasan, tambang emas, dan

* Makalah ini merupakan bahan diskusi dalam Dialog Ramadhan, Masika ICMI Orwil Sulawesi Selatan di Makassar, 11 Juli 2015. Terima kasih kepada Saudara Ashry Sallatu, Ketua Umum Masika ICMI Orwil Sulawesi Selatan atas kesempatan ini untuk menyajikan gagasan dan pokok-pokok pikiran mengenai masyarakat Papua. Sebuah kehormatan untuk menjadi bagian dari acara dialog Ramadhan yang dilaksanakan Masika ICMI.

** Penelitian ini bagian dari usulan penelitian untuk Kolaborasi Penelitian dengan Korea Institute of South East Asia Studies (KISEAS), Korea Selatan. Tim Peneliti terdiri dari DR. Choe-Tae Young (KISEAS), DR. Hamzah (STAIN Sorong), dan, DR. Basri Amin (Universitas Negeri Gorontalo), DR. Muhammad Yusuf (UIN Alauddin Makassar).

keterbelakangan. Padahal, melampaui itu semua, masyarakat Papua adalah masyarakat yang harmonis. Persaudaraan menjadi pilar utama kehidupan masyarakat. Mereka sejak awal sudah menjadikan kehidupan sebagai bagian keadaban untuk saling terkait dan mendukung bukan karena kesamaan agama. Bahkan dalam urusan politik dan agama yang menjadi pemicu konflik, mereka tetap saja dapat guyub. Ini dapat dilihat di rumah orang tua, mereka terbiasa menyediakan ruang tamu dengan ukuran lebih besar dibandingkan rumah sang anak. Ini dilakukan demi menjadi ruang bagi keluarga besar untuk berkumpul dalam setiap perayaan keagamaan salah satu anggota keluarga. Rumah orang tua menjadi tempat berkumpul anak dan cucu walaupun mereka sesungguhnya memilih agama yang berbeda-beda.

Padahal, Papua senantiasa dilabeli dengan konflik, kekerasan, dan keterbelakangan. Di tengah itu semua, hanya stigma yang terbentuk menjadikan Papua seperti lambang dari keberingasan. Seolah-olah kehidupan di Papua sangatlah tidak bersahabat dan justru menjadi lading pembantaian. Padahal, di tengah semua itu justru Papua adalah tempat yang sangat damai dan harmoni. Penyelenggaraan ritual keagamaan tidak pernah mendapatkan halangan. Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah tidak pernah terjadi. Sementara ekspresi keberagaman juga selalu tidak pernah menemui hambatan. Semua ini luput dari perhatian. Padahal jikalau saja mengenal orang Papua dengan lebih dekat, maka kita akan mendapatkan kehangatan sebuah persaudaraan yang tanpa pamrah dan apa adanya. Mereka memperlakukan orang lain sebagai keluarga sehingga menjaga harkat, martabat dan kehormatan diri sendiri sama dengan yang dilakukannya untuk orang lain.

Suku Kokoda dan Arandai, dua diantara masyarakat Papua yang sudah sejak awal memeluk Islam. Sehingga keduanya secara turun temurun sudah menjadikan Islam sebagai pilihan. Mereka hidup berdampingan dengan keluarga dalam suku besar dengan sama-sama mendiami wilayah adat yang mereka miliki tanpa pernah berselisih apapun, termasuk dalam urusan pembagian hak ulayat tanah. Sementara Suku Dani di Lembah Baliem, Wamena sejak 1980 sudah mulai memeluk agama Islam. Begitu juga dengan Suku Abun di Sausafor, Kabupaten Tamberauw, mereka beralih untuk memeluk agama Islam setelah sebelumnya hanya menganut faham animisme. Proses transformasi seperti ini tidak menjadi isu apa-apa. Karena memang dipandang bahwa urusan agama adalah pilihan masing-masing individu dan tidak akan pernah terkait dengan individu lain. Seseorang yang beragama justru akan memperkuat ikatan sosial dengan masyarakatnya dan tidak akan mengisolasi diri dan merusak hubungan dengan keluarga yang dimilikinya.

Agama sejatinya adalah berdasarkan praktik lingkungan dan dijadikan sebagai bagian dari sosial (Durkheim, 2002). Dengan demikian, lingkungan sosial jugalah yang menentukan bagaimana agama itu menjadi instrumen yang menggerakkan masyarakat. Sementara di Tibet, agama menjadi alat untuk menjaga kelangsungan lingkungan. Kesadaran ini diturunkan oleh generasi sebelumnya dengan menekankan kepada sikap etik keagamaan terhadap penjagaan lingkungan (Ramble, 2008). Begitu juga di Nepal, lingkungan dapat terjaga dan dijadikan sebagai sandaran hidup bagi masyarakat karena adanya faktor agama yang senantiasa mendukung kampanye pelestarian lingkungan (Stevens, 1997). Dengan dukungan politik, maka secara bersama-sama, agama juga dapat dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan legitimasi (West, 2006). Praktik di Papua Nugini menunjukkan bahwa dengan kombinasi antara agama dan politik kemudian menjadi kesatuan untuk memberikan arahan dan penekanan terhadap agenda pemerintahan. Dalam lingkungan yang terbatas, agama dapat pula menjadi bagian untuk menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan kelas pembelajaran bahasa (Wekke, dan Lubis, 2008).

Kajian ini menjadi bagian yang melengkapi mozaik Islam di Papua Barat yang mencakup arsitektur (Wekke, 2013), entitas dakwah dan budaya Islam (Wekke dan Sari, 2012), ekspresi keberagaman (Wekke, Gunaisah, dan Suyatno, 2015), pendidikan Islam (Wekke, 2011), kurikulum (Wekke, 2012), pendidikan dan pemberdayaan (2013), dan juga tentang pernikahan etnis Bugis (Wekke, 2012). Kesemuanya menjadikan sajian ini dapat menjadi bagian dalam pemahaman tentang minoritas muslim.

PERSAUDARAAN DAN IKATAN EMOSIONAL SEBAGAI PEREKAT

Spirit persaudaraan dalam konteks keluarga disebut dengan Satu Tungku Tiga Batu. Ketika sebuah tungku digunakan untuk memasak, paling tidak memerlukan tiga batu. Lambang tiga batu itulah menjadi metafora keragaman keyakinan. Sehingga bagi sebuah keluarga, tidak ada masalah perbedaan agama bahkan tiga agama sekalipun, tiga agama itu Islam, Protestan, dan Katolik. Agama justru dijadikan alat untuk lebih bersatu dan guyub untuk bersama-sama menopang keberlangsungan masyarakat. Dengan perayaan agama akan menjadi sarana dalam bertemunya kesempatan untuk saling mengunjungi, menyapa, bertemu, dan berbagi. “Merayakan bersama” sebuah momentum keagamaan untuk dijadikan waktu untuk membantu keluarga yang lain. Perayaan idul fithri kesempatan bagi masyarakat Protestan dan Katolik untuk membantu saudaranya memasak sebagai persiapan

menyambut hari raya. Sementara bagi warga muslim ketika Natal juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk turut membantu memasak dan mempersiapkan hidangan dalam menyambut tamu atau perayaan misa sepanjang Desember.

Sementara di Kepulauan Raja Ampat dikenal Satu Rumah Empat Pintu. Di samping Islam, Katolik, dan Protestan, animisme juga diberikan penghormatan yang sama sebagai bagian dari keluarga. Paling tidak dalam sebuah rumah mereka memiliki keragaman agama antara satu dengan yang lainnya bahkan sampai empat agama yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa mereka menempatkan toleransi sebagai pilar kehidupan. Jikalau ada pilihan agama yang berbeda dengan penghuni rumah, maka ini tidak dijadikan sebagai sebuah alat untuk memecahkan ikatan kekeluarga. Ungkapan “sa pu keluarga” yang berarti saya punya keluarga menjadi dasar ikatan sosial dalam masyarakat. Sehingga agama apapun itu, bukanlah hambatan dalam meruntukan persaudaraan yang sudah terbangun sejak awal. Sementara agama dapat saja berbeda dan mengalami perubahan kapan saja.

Menjelang MTQ tingkat Provinsi Papua Barat 2014, Imam Masjid Al-Bitrul, Kiyai H. Saleh Jauhar mengalami pemukulan dari pemuda mabuk ketika akan mengisi jadwal siaran di RRI Kota Sorong. Saat itu masih gelap karena siaran dilaksanakan di waktu shubuh. Kiyai Saleh tidak dapat mengenali pelaku. Justru keluarga oknum yang beragama Protestan itulah yang menyerahkan pelaku langsung ke kantor polisi. Sementara pemuda gereja di Pasar Baru menjaga masjid al-Jihad sebagai bentuk kehati-hatian karena merebaknya isu akan adanya saling serang antar dua kelompok berbeda agama. Sementara remaja masjid menjaga gereja Pantekosta yang berada di Sorong Pusat. Dengan hitungan menit, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong dan beberapa pastor dan pendeta sudah bertemu kemudian mereka bersama-sama berkeliling ke beberapa masjid dan gereja untuk menyampaikan kejadian sebenarnya. Kurun waktu dua jam, isu yang beredar dapat diredam dan tidak terjadi pertengkaran apapun juga yang memang tidak diinginkan. Akhirnya MTQ berjalan dengan sukses dan tanpa menemui kendala apapun juga. Karena Kota Sorong merupakan tempat transit bagi seluruh kafilah yang menuju Raja Ampat dengan menggunakan kapal fery. Jikalau saja terjadi masalah di Kota Sorong, maka pelaksanaan MTQ dapat saja gagal.

Sama halnya dengan perayaan Natal, saat itu semua penduduk Aimas berusaha untuk memeriahkan acara jamuan makan yang dilaksanakan tokoh masyarakat Stepanus Malak. Sementara di Malanu, Kota Sorong, Lamberthus Jitmau juga melaksanakan syukuran Natal dengan menjamu masyarakat. Di kedua tempat tersebut, masing-masing

dimeriahkan dengan penduduk untuk memberikan selamat Natal kepada empunya acara. Tidak ada kekhawatiran akan soal makanan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam karena tukang masak yang mempersiapkan hidangan justru berasal dari kalangan muslim. Demikian pula alat-alat makan yang digunakan sepanjang acara semuanya berasal dari perusahaan catering yang dijalankan muslim. Sebelum dan setelah Natal, tetangga muslim senantiasa membantu persiapan acara dan bahkan membersihkan tempat acara sesuai perhelatan. Mereka juga mengirimkan bingkisan kepada tetangga yang merayakan Natal sebagaimana ketika umat Islam merayakan idul fithri dan idul adha senantiasa mendapatkan kiriman bingkisan dari tetangga Protestan dan Katolik.

Ini berlangsung bukan karena momen ini saja, setiap hari anak-anak bergaul tanpa mempersalahkan urusan identitas agama. Saling berkunjung satu sama lain. Dengan proses ini, maka saat perayaan hari keagamaan merupakan bagian yang harus juga dirayakan bersama. Setiap tahun siapapun yang berada di Papua dan Papua Barat, tanggal 5 Februari menjadi perayaan Injil masuk di Tanah Papua. Perayaan ini tidak saja secara khusus untuk umat Protestan. Bagi kalangan muslim, ini juga patut dirayakan dimana keberadaan dan perkembangan Protestan tidak dapat dilepaskan dari Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Justru ketika awal mula penyebaran Protestan di Pulau Mansinam yang menjadi bagian Kabupaten Manokwari saat ini justru ditunjukkan oleh Sultan Ternate dan pesatnya perkembangan Protestan didukung sepenuhnya oleh Sultan Tidore dengan memberikan kesempatan kepada para misionaris untuk menyebarkan ke kawasan yang belum memeluk agama apapun.

Secara berkala kelompok-kelompok rebana atau kasidah di Kota Sorong mengadakan lomba sebagai ajang silaturahmi. Dalam proses latihan dan penyiapan kostum, ini tidak saja didukung oleh pengurus masjid tetapi juga beberapa penduduk sekitar masjid yang berbeda agama juga turut menyumbang. Bahkan di Masjid At-Taubah, Malanu Kota Sorong, salah satu warga sekitar menyumbang dengan angka sampai puluhan juta rupiah. Karena dalam lomba tidak saja membawa identitas masjid tetapi juga wilayah perumahan, maka dengan ringan tangan dan disertai keinginan untuk menjadikan ajang lomba sebagai perkenalan sesama warga sehingga yang turut menyumbang bukan saja dari kalangan umat Islam. Identitas yang berkembang tidak lagi sebatas pada masjid ataupun kasidah. Melainkan sudah menjangkau pada wilayah perumahan yang menjadi kebanggaan bersama warga.

AGAMA DAN KEBERAGAMAAN

Islam bersama-sama dengan Protestan dan Katolik menjadi pilar keberagaman masyarakat Papua Barat. Di beberapa lokasi, wujud juga masyarakat Hindu dan Budha. Di Aimas, Kabupaten Sorong beberapa pegawai Kementerian Agama diangkat untuk mengurus bimbingan masyarakat. Sementara di Kota Sorong, ada pagoda yang menjadi tempat ibadah masyarakat Budha yang sangat representatif. Begitu juga masjid dan gereja memiliki fasilitas yang relatif memadai. Masjid-masjid di Aimas, Kabupaten Sorong, untuk sebuah kubah saja menghabiskan sampai seratus juta rupiah. Dengan dukungan anggaran daerah, beberapa masjid memiliki mobil ambulans untuk dijadikan sebagai sarana pelayanan bagi jamaah masjid.

Sementara tipikal masjid di Kota Sorong justru dengan leluasa membangun sekolah dan madrasah. Masjid Al Akbar dan Masjid Al Jihad, keduanya memiliki sekolah dan merupakan lembaga pendidikan yang unggul. Untuk mendaftar di SD Al Jihad, sejak dini hari pukul 3 orang tua calon murid rela untuk antri sehingga memiliki peluang untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Adapun Masjid Al Akbar yang menjadi masjid agung mengelola gedung pertemuan dan juga poliklinik. Masjid ini pulalah yang memberikan tempat bagi Majelis Ulama Indonesia dan organisasi muslim lainnya untuk bersekretariat di tempat ini. Keleluasaan seperti ini menjadi gambaran betapa aktivitas keagamaan senantiasa mendapatkan tempat untuk tetap berlangsung. Tidak mendapatkan hambatan apapun juga.

Perguruan tinggi berdiri dilandasi dengan semangat keberagaman. Walaupun demikian, pendidikan tinggi itu tidak dikelola secara eksklusif. Di Universitas Victory yang didirikan yayasan Protestan, dosen dan mahasiswa juga berasal dari kalangan muslim. Sementara di Universitas Muhammadiyah Sorong dan STKIP Muhammadiyah Sorong, keduanya memberikan keleluasaan bagi untuk membentuk organisasi mahasiswa Protestan dan Katolik. Bahkan sejak pendiriannya, perguruan tinggi tersebut memberikan tempat khusus untuk kebaktian dan acara Natal yang menggunakan nama universitas secara resmi. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Sorong dijabat mahasiswa dengan tidak memperhatikan latar belakang keagamaan. Sehingga dalam beberapa kesempatan ketua umum BEM justru berasal dari Protestan atau Katolik. Politeknik Santa Paul yang dikelola yayasan Katolik, juga membuka pintu seluas-luasnya bagi mahasiswa muslim. Termasuk pula bagi dosen untuk berkiprah dan menempati posisi akademik sehingga jenjang tertinggi. Di Santa Paul ini, mahasiswa muslim membentuk

komisariat Himpunan Mahasiswa Islam dan demikian halnya pada Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia. Pihak rektorat di masing-masing perguruan tinggi menjadikan ini sebagai sebuah kekayaan dan keragaman yang akan memperkaya universitas dan sekolah tinggi.

Penerimaan perbedaan seperti menjadi gambaran bahwa sesungguhnya agama hanyalah dijadikan sebagai alat untuk membentuk legalitas formal dan mengusahakan berdirinya lembaga pendidikan. Sementara dalam proses pengembangan tidak lagi secara terbatas menerima mahasiswa dari kalangan internal. Itu berlaku bagi setiap lembaga. Mereka membuka diri untuk secara bersama-sama dengan umat agama lain dalam memberikan fungsi pelayanan pendidikan. Sebelum peraturan kewajiban menyediakan dosen agama sesuai dengan keyakinan masing-masing mahasiswa, setiap universitas di Papua dan Papua Barat sudah menerapkan pola pendidikan seperti itu. Bukan saja di tingkatan perguruan tinggi, bahkan ini dijalankan sejak di pendidikan dasar. Sekolah-sekolah di Tanjung Kasuari, Saoka, dan Rufei, sekalipun mereka memiliki jarak dari Kota Sorong dan memiliki keterbatasan untuk mendatangkan guru agama, tetap saja mereka menyediakan guru untuk masing-masing agama. Sehingga setiap murid belajar sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak satupun murid yang tidak belajar agama hanya karena alasan ketiadaan guru. Di sinilah peran serta kepala sekolah dan dinas pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang sama dan setara kepada setiap anak bangsa.

Demikian pula dalam beberapa kesempatan ketika Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) yang ada di Kota Sorong memiliki keterbatasan dalam hal penyediaan guru, Dinas Pendidikan Kota Sorong menugaskan guru secara khusus untuk mengajar di MAN dan MTsN, mereka diperbantukan untuk memaksimalkan fungsi pelayanan madrasah. Padahal secara kelembagaan, tanggung jawab manajemen madrasah berada di Kementerian Agama. Menyadari keterbatasan ini, pihak dinas pendidikan tidak menghiraukan pola birokrasi. Justru guru-guru yang mereka miliki ditempatkan di madrasah untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak bangsa dengan peluang yang sama. Padahal, pejabat di dinas pendidikan sebagian besar berlatarbelakang Protestan. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa agama bukanlah penghalang dan sekat dalam urusan pendidikan. Kepentingan yang lebih besar, seperti kesempatan pendidikan dan usaha mencerdaskan siswa-siswi adalah soal yang lebih besar dibandingkan dengan pilihan agama. Status agama justru dikesampingkan dan tidak

menjadi perhatian untuk memberikan pelayanan publik. Saling membantu, kerjasama, dan saling pengertian menjadi dasar bagi usaha menggerakkan pendidikan.

Kepemimpinan berlangsung secara alami. Dengan berdasar pada kemampuan individual sehingga layak untuk menempati posisi dalam pelayanan publik. Sebelum Ramadhan 1436 H/2015 M, Muhammad Rahman, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berasal dari Sulawesi Selatan, dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekalipun Walikota Sorong beragama Protestan, kemampuan Rahman menjadi pertimbangan utama. Tidak saja kali ini, tetapi pemerintahan berlangsung dengan dilandasi semangat untuk pengelolaan kepentingan rakyat. Sebagaimana di Kabupaten Sorong, Bupati Sorong mengangkat Sekretaris Daerah yang beragama Islam. Paduan kepemimpinan di kedua wilayah ini juga menjadi semakin kuat dengan Bupati yang didampingi wakil dari agama Islam. Begitu pula di Kota Sorong, wakil walikota yang dijabat oleh muslim. Kesemuanya menunjukkan ada penerimaan secara luas kepemimpinan seorang muslim dalam politik dan birokrat. Sehingga walaupun penduduk di beberapa lokasi lebih dominan beragama Protestan dan Katolik tetapi tidak mengurangi kesempatan bagi organisasi pemerintahan untuk mendapatkan aparatur yang terbaik untuk memimpinnya.

PAPUA MASA KINI DAN MASA DEPAN

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional menjadi tanda dimana Islam di Papua Barat merupakan akumulasi kerja keras dan kerja sama. Dalam pelaksanaan MTQ di Batam 2014, Papua Barat menempati posisi empat besar. Hanya dikalahkan oleh Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Jakarta. Ketika pelaksanaan MTQ tingkat Papua Barat usai dilaksanakan di Raja Ampat, persiapan untuk menuju ke MTQ Nasional senantiasa didukung oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Padahal tidak semua dari aparatur adalah muslim. Namun demikian, mereka melihatnya sebagai bagian dari kebanggaan daerah. Tidak memandang sebagai acara bagi umat Islam saja. Tetapi kesempatan untuk mengangkat citra dan harkat provinsi secara keseluruhan.

Kepanitiaan MTQ mulai tingkat distrik sampai provinsi dan begitu juga dengan selama pelatihan menuju MTQ Nasional dan kafilah yang menyertainya senantiasa digerakkan oleh panitia dengan latar belakang agama yang berbeda. Panitia tidak saja berasal dari unsur aparat pemerintah daerah yang muslim tetapi juga dari pendeta dan pemuda gereja. Mereka menjadi bagian inti dari pelaksanaan MTQ. Kerja keras dilakukan

secara bersama karena hanya satu keinginan yaitu memperlihatkan prestasi di tingkat nasional. Kebersamaan menjadi kata kunci bagi upaya bersama tersebut. Sementara persaudaraan menjadi bagian yang menyatukan walaupun dengan agama yang berbeda.

Kekerasan yang berkobar di Maluku di akhir 2000 sampai beberapa tahun berikutnya tidak meluas sampai ke Papua. Walaupun secara geografis jarak antara Kota Ambon dan Kota Sorong hanya ditempuh dengan semalam ketika menggunakan kapal laut. Namun kedekatan ini tidaklah memiliki makna apa-apa. Dimana kobaran kekerasan yang menggunakan sentimen agama untuk tetap menghabisi kelompok lain justru tidak dipedulikan di Kota Sorong. Padahal kekhawatiran akan terjadinya kejadian serupa senantiasa menghantui penduduk Kota Sorong. Tetapi sampai berdamainya penduduk Maluku, tidak satupun perkelahian di Papua Barat terjadi karena dampak dari kejadian di Maluku. Justru ini dijadikan kesempatan untuk saling mengingatkan bahwa kerugian yang terjadi di Maluku jangan sampai terjadi di Papua Barat. Kerugian tidak saja dalam aspek material terlebih lagi dalam urusan emosional dan juga akan menguras lebih banyak energi sekaligus menghancurkan sendi-sendi modal sosial masyarakat.

Tidak saja untuk antar umat beragama. Secara internal umat Islam juga menyatukan diri dalam Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua (YAPIS). Sehingga perbedaan antara organisasi kemasyarakatan juga dapat diredam. Demikian juga dengan YPK dan YPPK. Sehingga masing-masing agama berusaha untuk menjaga kekuatan harmoni secara internal dan eksternal. Ketiga organisasi ini tumbuh dan berkembang dengan nama yang khas berasal dari Tanah Papua, dimana di belahan Indonesia lainnya tidak ditemukan. Masing-masing organisasi secara internal saling berusaha untuk memberikan pengakuan kepada yang lainnya dan duduk bersama dalam majelis. Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah kemudian menjadikan relasi dengan organisasi keagamaan melalui satu pintu sehingga terjadi dialog yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemerintah juga secara khusus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap penduduk. Adapun kategori agama digunakan secara produktif. Ketika pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) umat Islam diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perluasan Masjid At-Taubah di Malanu, Kota Sorong justru didukung dengan adanya kerelaan pemilik lahan yang beragama Protestan untuk menyerahkan tanahnya. Walaupun dibayar dengan sejumlah uang tetapi harga yang diserahkan pengurus masjid jauh dari harga pasar. Ini sekaligus sebagai dukungan bagi masjid untuk mendapatkan lahan dimana wilayah Malanu merupakan kawasan yang padat dengan pemukiman dan

salah satu pusat bisnis di Kota Sorong. Sementara itu, tanah yang dimiliki Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong justru diserahkan kepada gereja untuk dijadikan sebagai lahan dalam membangun rumah ibadah. Dua hal ini membuktikan bahwa sekalipun tempat ibadah merupakan bagian yang esensi dalam kehidupan beragama, justru tidak menghalangi penganut agama yang berbeda untuk saling mendukung berdirinya gereja ataupun masjid. Dengan kesediaan untuk memberikan bantuan dan dengan bantuan, maka justru masjid dan gereja berdiri.

Selama proses penghimpunan dana untuk membangun masjid, maka itu kesempatan seluruh warga kota untuk saling bahu membahu. Bazar salah satunya wadah untuk bertemu. Saat panitia masjid mengedarkan kupon yang menjadi tanda sumbangan, maka seluruh warga secara bergotong royong membeli sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saat bazar dilaksanakan, masyarakatpun datang dan bertemu untuk saling menyapa. Kupon bazar yang dibeli dapat digunakan untuk ditukarkan untuk mendapatkan makanan yang tersedia. Adapun penanganannya itu disiapkan oleh jamaah masjid sekitar tanpa memandang latar belakang agama.

Paparan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Papua dan Papua Barat adalah bagian dari harmoni keberagaman yang terbentuk berdasarkan situasi sosial. Pilar harmoni itu justru dibangun dari institusi keluarga dan akhirnya menyebar dalam lingkungan masyarakat secara luas. Ini akhirnya menjadi praktik yang jamak dan dijadikan sebagai keharusan. Agama tidaklah menghalangi pembentukan kerukunan, justru dengan agama itulah menjadi ajang untuk membangun kesepahaman dan akhirnya saling mendukung antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bahkan ini sudah dimulai dari bagian terkecil yaitu individu dalam keluarga. Mereka tidak mempermasalahkan pilihan anggota keluarga lain jika memilih agama yang berbeda dari keluarga besar. Dalam sebuah keluarga sebuah kelaziman adanya perbedaan dalam keluarga tetapi justru dengan perbedaan itu kemudian mereka berusaha untuk saling memberikan dukungan dalam merayakan tradisi keagamaan.

Artikel ini menunjukkan bahwa agama sesungguhnya bukanlah bagian konflik (Aliyev, 2007). Hanya saja para pengikutnya kemudian menjadikan agama sebagai komoditas utama ketika berusaha untuk mempertahankan kebencian. Padahal sejatinya, agama tidaklah menjadi pemicu konflik (Allen et al., 2014). Akhirnya, dengan agama justru menjadi alat untuk saling mendamaikan dan membangun relasi sosial dalam masyarakat (McCormack, Brinkley-Rubinstein, & L. Craven, 2014). Bahkan dalam

kepemimpinan yang senantiasa menjadikan agama sebagai semangat justru terbangun keinginan untuk saling mendukung diantara anggota masyarakat (La Ferle & Chan, 2008).

PENUTUP

Artikel ini menegaskan bahwa agama bukanlah sebagai pemicu sebuah konflik. Justru agama dijadikan sebagai kambing hitam bahwa sumber konflik padahal tidaklah pernah ada perkelahian karena perbedaan dimulai dari sisi agama. Hanya saja, ada sisi lain yang memulai dan kemudian agama diikutkan sebagai bagian dari konflik. Papua menunjukkan bahwa agama justru menjadi perekat keguyuban masyarakat. Dari soal pendidikan sampai pada perayaan ritual keagamaan dijalankan dengan semangat persaudaraan. Kesatuan dan persatuan dalam masyarakat senantiasa diusahakan untuk saling mengerti dan saling membantu. Identitas agama semata-mata merupakan soal pribadi dan pilihan yang dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta dengan tidak mengurangi hubungan antar sesama manusia.

Relasi keagamaan tercipta atas dasar harmoni dan saling pengertian. Lembaga-lembaga pendidikan berjalan dan institusi sosial lainnya tetap berkembang dengan adanya keinginan untuk saling memberi kesempatan dan peluang yang sama tanpa memandang status agama. Justru agama memperkuat lembaga secara positif kemudian dengan spirit itu pulalah hubungan kemanusiaan terbangun untuk kepentingan saling mencerdaskan. Maka, bukan halangan seorang mahasiswa muslim untuk kuliah di perguruan tinggi yang dikelola oleh Yayasan Katolik ataupun Yayasan Protestan. Demikian pula sebaliknya seorang mahasiswa Protestan dan Katolik justru menyelesaikan sarjana di perguruan tinggi yang dijalankan Muhammadiyah. Sebelumnya, justru mereka menamatkan pendidikan menengah yang dikelola Al-Maarif, lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdhatul Ulama. Hubungan seperti ini justru saling memperkuat dengan tetap mempertahankan kesetiaan kepada masing-masing agama mereka sendiri. Sementara itu pihak sekolah dan perguruan tinggi juga mengusahakan guru dan dosen yang seiman. Ini berlangsung ketika praktik seperti ini belum diatur oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Perayaan Natal dan Idul Fithri menjadi bagian dari pertemuan keluarga besar. Ini dilihat di rumah orang tua atau anggota keluarga tertua. Setiap perayaan hari besar keagamaan justru merupakan kesempatan untuk berkumpul. Di saat itu pulalah mereka berbagi dan saling mengirimkan makanan atau bingkisan antar sesama. Kondisi-kondisi seperti menjadi bagian tradisi yang sudah berlangsung turun temurun sehingga perbedaan

agama tidaklah menjadi persoalan bagi setiap orang. Secara bebas, individu memeluk agamanya kemudian keterhubungannya dengan penduduk kota yang lain karena mereka adalah bagian wilayah yang harus turut bertanggungjawab memelihara kedamaian yang sudah diwariskan oleh pendahulu. Kalim kebenaran cukuplah dilakukan secara khusus di dalam rumah ibadah. Tetapi ketika berjumpa dengan orang lain, maka tidaklah perlu untuk menjadi agama sebagai bagian yang harus dijadikan sebagai pembeda justru itu dipergunakan untuk saling menghormati pilihan yang berbeda.

Dalam beberapa kesempatan, pendirian masjid dan gereja justru didukung oleh masyarakat lingkungan sekitar yang berbeda agama. Sehingga tidak kesulitan untuk membangun rumah ibadah, sekalipun itu di sekelilingnya terdapat masyarakat yang menganut agama yang berbeda dengan bangunan yang akan diselesaikan. Bahkan dalam urusan tanah untuk menjadi tempat utama bangunan justru dihibahkan oleh masyarakat atau organisasi yang berbeda pula.

PERNYATAAN TERIMA KASIH

Makalah disusun sejatinya karena Masika ICMI Orwil Sulawesi Selatan memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari Dialog Ramadhan. Sekali lagi, sebuah kehormatan untuk turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Dengan segala keterbatasan dan juga dinamika yang ada, maka ketika kawan-kawan Masika ICMI mau dan memberikan jalan untuk mendengar Suara dari Timur, ini adalah kesempatan terbaik untuk saling bersinergi. Untuk itu, kami menuliskan makalah ini sebagai bagian dari publikasi untuk mengapresiasi undangan kawan-kawan Masika. Setelah diskusipun kesempatan untuk saling menyapa menjadi bagian yang menyempurnakan makalah ini. Saya seperti “tersanjung” walaupun sesungguhnya banyak pakar dan ahli lain dengan kaulifikasi yang lebih baik dan layak untuk berbicara di forum terhormat tersebut. Justru ketika kawan-kawan Masika ICMI Orwil Sulawesi Selatan memberikan kesempatan itu kepada saya, menjadi tantangan sekaligus sebuah penghargaan. Untuk kawan-kawan Masika ICMI saya persembahkan makalah ini setelah melalui revisi dan penyuntingan usai dialog Ramadhan.

Di tengah sejuiknya Camba, makalah ini kembali kami sunting untuk beberapa perbaikans ehingga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk memperkaya informasi yang sudah ada sebelumnya. Secara detail beberapa hal ditulisan kembali sehingga dapat menjadi gambaran tentang kondisi yang dipaparkan. Justru berada di tengah kehangatan suasana keluarga di Camba menjadi salah pendorong sehingga makalah ini terwujud.

Terakhir, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia menjadi bagian yang sangat mendukung penulisan makalah, dan begitu juga dengan Lembaga Persada Papua. Untuk keduanya kami sampaikan terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami. Kesemuanya menjadikan kesempatan untuk menuliskan makalah ini menjadi lebih muda dapat dilakukan.

Terakhir dan ini yang tidak kalah pentingnya dua cahaya mata kami yang selalu “menggangu” ketika ayah mereka berdua mulai membuka laptop. Putri Izzah Wekke dan Dwiani Marwah Wekke, keduanya selalu menjadi putri-putri yang manis dan menemani ayah ketika menulis. Walaupun itu merengut masa-masa bermain mereka. Pada kalian berdualah ayah persembahkan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyev, F. B. (2007). Problems of interaction between state and economy under the post-communist transition. *Humanomics*, 23 (2), 73–82.
- Allen, L., Quinlivan, K., Aspin, C., Sanjakdar, F., Brömdal, A., & Lou Rasmussen, M. (2014). Meeting at the crossroads: re-conceptualising difference in research teams. *Qualitative Research Journal*, 14 (2), 119–133.
- Durkheim, E. (2002). The elementary forms of religious life. In Lambek, M. (ed.), *A Reader in the Anthropology of Religion*. Blackwell Publishing, Malden, 34–49.
- La Ferle, C., & Chan, K. (2008). Determinants for materialism among adolescents in Singapore. *Young Consumers*, 9 (3), 201–214.
- McCormack, M., Brinkley-Rubinstein, L., & L. Craven, K. (2014). Leadership religiosity: a critical analysis. *Leadership & Organization Development Journal*, 35 (7), 622–636.
- Ramble, C. (2008). *The navel of the Demoness: Tibetan Buddhism and Civil Religion in Hightlight Nepal*. Oxford University Press, Oxford.
- Stevens, S. (1997). Annapurna Conservation Area: Empowerment, conservation and development in Nepal. In Stevens, S. (ed.), *Conservation through cultural survival*. Island Press, Washington, D.C., 237–261.
- Wekke, I. S. & Lubis, M. A. (2008). A Multicultural approach in Arabic language teaching: creating equality at Indonesian pesantren classroom life. *Sosiohumanika*, 1 (2), 295–310.
- Wekke, I. S. (2012). Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudhatul Khuffadz Sorong Papua Barat. *Jurnal Inferensi*. Volume 6, No. 2: 203–226.
- Wekke, I. S. (2013). Masjid di Papua Barat: Tinjauan Ekspresi Keberagamaan Minoritas Muslim dalam Arsitektur. *Jurnal Budaya Islam El Harakah*, 15 (2), 124–129.
- Wekke, I. S. (2013). Religious Education and Empowerment: Study on Pesantren in Muslim Minority West Papua. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Miqot*, XXXVII (2) Juli-Desember, 374–395.

- Wekke, I. S., & Sari, Y. R. (2012). Tifa Syawat dan Entitas Dakwah dalam Budaya Islam: Studi Suku Kokoda Sorong Papua Barat. *Jurnal Kajian Budaya Islam Thaqafiyyat*, 13 (1), Juni, 163-186.
- Wekke, I. S., Gunaisah, E., Suyatno. (2015). Identitas dan Ekspresi Keberagamaan Nelayan Muslim: Masyarakat Pesisir Raja Ampat Papua Barat. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan*. 10 Maret. Sorong: Politeknik Kelautan dan Perikanan.
- Wekke, I. S.. (2011). Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Pendidikan Vokasional Pesantren Roudhatul Khuffadz, Sorong). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Hermenia*, 10 (1), 25 – 53.
- Wekke, I. S. (2012). Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat. *Jurnal Kajian Budaya Islam Thaqafiyyat*, 13 (2) Desember.
- West, P. (2006). *Conservation is our government now: The politics of ecology in Papua New Guinea*. Duke University Press, Durham.